

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP): Memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Keterangan mengenai kerugian negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pasal 23 ayat 2	Melindungi surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.
2	Keputusan Pemberian Ijin Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bercerai	Melindungi data pribadi yang bercerai	Informasi akan dibuka apabila mendapat persetujuan secara tertulis oleh yang bersangkutan
3	Kode Akses/ Password Aplikasi SILAT/SIAP/SIMANJA/OACK/TALE NTA KEPRI	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi pasal 65	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan atau manipulasi data	Melindungi informasi data pribadi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
4	Data hasil pengolahan penilaian Assesment PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP
5	Hasil Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan kerahasiaan dan informasi yang tidak boleh diungkapkan	Melindungi informasi data Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan instansi masing-masing
6	Dokumen Hasil Assesment Uji Kesesuaian Kualifikasi dan Kompetensi (JOB FIT) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi informasi data Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan instansi masing-masing
7.	Data pribadi pegawai yang meliputi NIK, nomor KK, NPWP, alamat rumah, nomor telepon pribadi, data keluarga, nomor rekening, data kesehatan, serta data pribadi lainnya yang terdapat dalam dokumen kepegawaian.	Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi	Sampai data tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau,



Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197601232003122008